



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

26 – 29 Mei 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

29 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Jumat, 26 Mei 2023	+
	MEDIA	https://www.kompasiana.com/eugeniaangela/6470a54108a8b50e40127452/sudah-efektifkah-program-rumah-bersubsidi-bagi-mbr	
	JUDUL	Sudah Efektifkah Program Rumah Bersubsidi bagi MBR?	
	NARASUMBER	-	
	RESUME	Program perumahan bersubsidi bagi MBR merupakan upaya yang baik dan sangat penting dalam menciptakan akses perumahan yang layak bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan yang dihadapi oleh sebagian besar MBR di Indonesia. Salah satu keunggulan utama dari program perumahan bersubsidi adalah memberikan kesempatan kepada MBR untuk memiliki tempat tinggal yang layak dengan biaya yang terjangkau. Melalui subsidi pemerintah, MBR dapat memperoleh rumah dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kekurangan yang membuat program ini tidak tepat sasaran. Salah satunya bank pelaksana program perumahan bersubsidi yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menemukan beberapa permasalahan.	
2	TANGGAL	Jumat, 26 Mei 2023	+
	MEDIA	https://ekonomi.bisnis.com/read/20230526/9/1659585/sri-mulyani-bayar-rp2621-t-untuk-pembiayaan-investasi-perumahan-mbr-per-april-2023	
	JUDUL	Sri Mulyani Bayar Rp26,21 T untuk Pembiayaan Investasi Perumahan MBR per April 2023	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

29 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	NARASUMBER	Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati	
	RESUME	Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan Rp26,21 triliun untuk pembiayaan investasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2023 hingga April. Terkait kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk perumahan, posisi dana FLPP per April 2023 telah mencapai Rp85,78 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah mencairkan dana FLPP Rp6 triliun pada 24 Februari 2023. Sampai dengan akhir April 2023 juga telah disalurkan 63.097 unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp7,05 triliun yang tersebar di 378 kota/kabupaten.	
3	TANGGAL	Sabtu, 27 Mei 2023	
	MEDIA	https://bangka.tribunnews.com/2023/05/27/pemerintah-bakal-terbitkan-aturan-harga-rumah-subsidi-bulan-depan-bakal-naik?page=all	
	JUDUL	Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Harga Rumah Subsidi, Bulan Depan Bakal Naik?	
	NARASUMBER	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bakti Martoyoedo	
	RESUME	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR , Haryo Bakti Martoyoedo mengungkapkan bahwa aturan baru terkait harga rumah bersubsidi itu masih diproses oleh Kementerian Keuangan. Ia melanjutkan, saat ini Kementerian PUPR sudah menyiapkan konsep Keputusan Menteri PUPR, karena harga jual bebas PPN untuk rumah subsidi itu nantinya dalam bentuk Kepmen. Kepmen PUPR itu akan mengatur batasan harga jual hunian yang dibebaskan dari PPN. Meski belum jelas berapa angka kenaikannya, Haryo Bakti menyatakan bahwa tidak ada perubahan terkait batasan penghasilan bagi pemohon KPR subsidi, yaitu untuk keluarga dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan dan untuk single Rp 7 juta per bulan. Meski PMK terkait harga rumah subsidi itu baru akan keluar bulan Juni 2023, Haryo Bakti meyakini target pembangunan 220 ribu rumah subsidi tahun 2023 ini akan tercapai. Bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa Fasilitas	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

29 / 05 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

	Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023 ini disediakan sebanyak 220.000 unit. Anggaran yang dialokasikan untuk FLPP 220.000 unit tersebut sebesar Rp 25,18 triliun.	
--	---	--



26 / 05 / 2023

| Sumber: kompasiana.com

Sudah Efektifkah Program Rumah Bersubsidi bagi MBR?

Author: Eugenia Angela Lusi

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan permintaan atas rumah tidak seimbang dengan ketersediaan rumah yang menyebabkan terjadinya kekurangan rumah (backlog). Tingginya kebutuhan atas rumah mengakibatkan tingginya harga rumah. Hal ini akan menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dalam mewujudkan impian untuk membeli rumah. Dalam upaya mensejahterakan rakyat, pemerintah berupaya memberikan bantuan subsidi berupa rumah untuk masyarakat MBR dengan dikeluarkannya program perumahan bersubsidi. Program perumahan subsidi adalah program pemerintah yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan tempat tinggal murah dan layak. Program Rumah MBR terdiri dari empat program yakni; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Secara umum, program perumahan bersubsidi bagi MBR merupakan upaya yang baik dan sangat penting dalam menciptakan akses perumahan yang layak bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan yang dihadapi oleh sebagian besar MBR di Indonesia. Salah satu keunggulan utama dari program perumahan bersubsidi adalah

memberikan kesempatan kepada MBR untuk memiliki tempat tinggal yang layak dengan biaya yang terjangkau. Melalui subsidi pemerintah, MBR dapat memperoleh rumah dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan perumahan antara kelompok berpenghasilan rendah dengan kelompok berpenghasilan menengah atau tinggi. Selain itu, program perumahan bersubsidi juga dapat memberikan stabilitas dan kepastian tempat tinggal bagi MBR. Dengan memiliki rumah sendiri, MBR dapat merasa lebih aman dan memiliki kebebasan untuk membangun masa depan mereka. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kekurangan yang membuat program ini tidak tepat sasaran. Salah satunya bank pelaksana program perumahan bersubsidi yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menemukan beberapa permasalahan. Pertama, lokasi perumahan subsidi sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas MBR. Banyak perumahan subsidi yang dibangun jauh dari pusat kota atau pusat kerja, sehingga sulit bagi penerima subsidi untuk mengakses ke



26 / 05 / 2023

Sumber: kompasiana.com

lapangan pekerjaan atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti transportasi umum, sekolah, dan pusat kesehatan seringkali kurang atau bahkan tidak ada di sekitar perumahan subsidi tersebut. Bahkan terdapat beberapa perumahan subsidi yang belum punya aliran listrik, air bersih, jauh dari angkutan umum, dan lainnya. Akibatnya, program ini tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi MBR dalam hal memperbaiki kualitas hidup mereka.

Kedua, kriteria pemilihan penerima program perumahan bersubsidi seringkali tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dialami oleh MBR. Banyak kasus di mana orang-orang dengan penghasilan yang sebenarnya relatif tinggi atau memiliki aset yang cukup besar berhasil memanfaatkan celah dalam sistem untuk memperoleh subsidi tersebut. Bahkan terjadi kasus dimana, dua rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah. Hal ini menyebabkan kelompok yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan, tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan.

Ketiga, kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan perumahan subsidi juga menjadi masalah. Banyak kasus di mana penerima subsidi menjual atau menyewakan rumah yang

seharusnya menjadi tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini tidak hanya merugikan tujuan program perumahan bersubsidi, tetapi juga tidak adil bagi MBR lain yang masih membutuhkan tempat tinggal layak. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif mengakibatkan penyalahgunaan program ini dan mengurangi manfaatnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk MBR masih menjadi tugas pemerintah. Ketepatan sasaran, tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengembangkan sistem besar untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih baik. Dalam hal ini dapat ditingkatkan lagi efektifitas penggunaan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang dapat berfungsi selain sebagai alat untuk mengajukan perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan pengawasan terhadap KPR subsidi perumahan.

<https://www.kompasiana.com/eugeniaange/6470a54108a8b50e40127452/sudah-efektifkah-program-rumah-bersubsidi-bagi-mbr>



26 / 05 / 2023

Sumber: bisnis.com

Sri Mulyani Bayar Rp26,21 T untuk Pembiayaan Investasi Perumahan MBR per April 2023

Author: Annasa Rizki Kamalina

Editor: Aprianto Cahyo Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan Rp26,21 triliun untuk pembiayaan investasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2023 hingga April.

Terkait kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk perumahan, posisi dana FLPP per April 2023 telah mencapai Rp85,78 triliun.

“Ini terutama membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah bersubsidi sebanyak 229.000 unit, jadi telah dikeluarkan Rp26,21 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita awal pekan ini, (22/5/2023).

Selain itu, pemerintah juga telah mencairkan dana FLPP Rp6 triliun pada 24 Februari 2023. Sampai dengan akhir April 2023 juga telah disalurkan 63.097 unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp7,05 triliun yang tersebar di 378 kota/kabupaten.

Sebagai informasi, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

MBR akan menerima KPR FLPP dengan suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, di mana KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan

asuransi kredit. Adapun, MBR yang dimaksud yaitu orang yang berstatus tidak kawin dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sementara itu, selain membayar untuk FLPP, Bendahara Negara juga telah mencairkan Rp2 triliun untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

“Untuk LDKPI, bantuan Indonesia untuk negara miskin dan mengalami krisis atau bencana alam telah dicairkan Rp2 triliun sehingga total endowment fund mencapai Rp8 triliun,” lanjutnya.

Pencairan pembiayaan investasi juga dilakukan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebesar Rp8 triliun, sehingga total endowment fund mencapai Rp134,1 triliun.

Sri Mulyani menekankan bahwa pembiayaan tersebut masuk dalam investasi, bukan belanja negara dalam APBN.

“Ini namanya investasi, bukan belanja, walaupun kelihatannya mirip,” katanya.

Pada 2023, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp176,3



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

26 / 05 / 2023

Sumber: bisnis.com

triliun, dan paling besar untuk klaster infrastruktur mencapai Rp85,3 triliun, klaster pendidikan Rp20 triliun, perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun.

Untuk klaster pangan dan lingkungan hidup pembiayaan investasi sebesar Rp4,8 triliun, kerja sama internasional Rp3,5 triliun,

klaster lainnya mencapai Rp58 triliun, dan kewajiban pinjaman senilai Rp0,33 triliun.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230526/9/1659585/sri-mulyani-bayar-rp2621-t-untuk-pembiayaan-investasi-perumahan-mbr-per-april-2023>



27 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Harga Rumah Subsidi, Bulan Depan Bakal Naik?

Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda

Editor: fitriadi

BANGKAPOS.COM- Pemerintah diketahui bakal segera menerbitkan aturan baru terkait [harga](#) rumah subsidi.

Hal itu disampaikan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan [Kementerian PUPR](#), Haryo Bakti Martoyoedo.

Haryo Bakti mengungkapkan bahwa aturan baru terkait [harga](#) rumah bersubsidi itu masih diproses oleh Kementerian Keuangan.

“Hasil diskusi kami, Juni 2023 diharapkan sudah bisa diundangkan. Seperti diketahui, untuk terbitnya Peraturan Menteri di mana pun, itu dibutuhkan paraf dari eselon satu terkait substansi aturannya. Saat ini prosesnya sudah mendekati Menteri Keuangan,” ungkap Haryo Bakti Martoyoedo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Ia melanjutkan, saat ini [Kementerian PUPR](#) sudah menyiapkan konsep Keputusan Menteri PUPR, karena [harga](#) jual bebas PPN untuk rumah subsidi itu nantinya dalam bentuk Kepmen.

Kepmen PUPR itu akan mengatur batasan [harga](#) jual hunian yang dibebaskan dari PPN.

Sebelumnya, [pemerintah](#) telah menerbitkan PP Nomor 49 tahun 2022 yang

berisi jaminan pengaturan penyesuaian [harga](#) rumah subsidi.

Aturan itu menjadi dasar bagi lahirnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang kini ditunggu-tunggu para pengembang rumah bersubsidi.

Haryo Bakti menyatakan bahwa PMK yang ditunggu-tunggu itu hanya mengatur fasilitas bebas PPN untuk rumah tapak. Sementara pengaturan fasilitas bebas PPN untuk rumah susun masih dalam pembahasan.

Terkait berapa angka kenaikan [harga](#) rumah subsidi tersebut, Haryo Bakti belum bisa memberikan gambaran. “Belum ada angkanya, tunggu keluarnya PMK saja, agar pasti,” tandasnya.

Meski belum jelas berapa angka kenaikannya, Haryo Bakti menyatakan bahwa tidak ada perubahan terkait batasan penghasilan bagi pemohon KPR subsidi, yaitu untuk keluarga dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan dan untuk single Rp 7 juta per bulan.

Meski PMK terkait [harga](#) rumah subsidi itu baru akan keluar bulan Juni 2023, Haryo Bakti meyakini target pembangunan 220 ribu rumah subsidi tahun 2023 ini akan tercapai.



27 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

Bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023 ini disediakan sebanyak 220.000 unit. Anggaran yang dialokasikan untuk FLPP 220.000 unit tersebut sebesar Rp 25,18 triliun.

“Itu alokasi dana yang kami punya, sementara kebutuhannya mungkin lebih besar lagi, di atas itu. Tapi kami optimis semuanya terserap. Tahun lalu realisasi 229.000 unit, di atas target. Padahal tahun lalu pandemi belum membaik, tahun ini kan sudah membaik,” kata Haryo Bkti.

Data dari [Kementerian PUPR](#) sendiri, hingga Mei 2023, realisasi FLPP mencapai 74.000 atau sekitar 34 persen dari target 220.000 unit.

Tanggapan Apersi

Menanggapi bakal keluarnya PMK terkait [harga](#) baru rumah subsidi pada Juni 2023 nanti, Ketua Umum DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia), Junaidi Abdillah merasa pesimistis target pembangunan 220.000 unit rumah subsidi tahun ini bakal tercapai.

“Kalau di sisa waktu ini kayaknya sulit mencapai 220 ribu unit, karena kenaikan ini seharusnya di awal tahun. Tapi faktanya ini kan belum, jika memang itu terjadi nanti bulan Juni terkait PMK saya yakin juga enggak bisa mengejar 220 ribu unit itu,” ungkap Junaidi Abdillah.

Menurut Junaidi Abdillah, hal itu karena terkait dengan proses produksi rumah subsidi, hingga proses perbankan yang memerlukan waktu.

“Terkait produksi misalnya, satu unit rumah itu rata-rata butuh waktu dua bulan untuk satu kelompok tukang. Rata-rata perumahan menengah itu mempekerjakan sampai 30 kelompok tukang. Perumahan menengah itu berkisar di antara 100 unit. Tapi kalau di atasnya, kelompok tukangnya lebih banyak lagi,” bebernya.

Di Apersi sendiri, kata Junaidi Abdillah, hingga Mei ini ada sekitar 172.000 unit rumah subsidi yang sudah direncanakan akan dibangun.

“Kalau [harga](#) baru itu dimulai awal tahun, harapannya 70 persen dari target 172.000 unit itu bisa terbangun, jadi sekitar 120.000 unit diharapkan bisa terbangun. Tapi kalau baru mulai Juni nanti, bisa-bisa realisasinya hanya sekitar 100.000-an unit. Sulit mengejanya,” kata Junaidi Abdillah.

Soal besaran kenaikan [harga](#) rumah subsidi, kata Junaidi Abdillah, Apersi telah mengajukan usulan sekitar 6-7 persen.

Jika di wilayah Jabodetabek [harga](#) rumah subsidi Rp 168 juta, maka kenaikan [harganya](#) di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 11,7 juta per unit.

“Kalau kenaikannya di bawah 6 persen, kami akan terima dulu itu, baru kami diskusikan kembali. Yang penting bagaimana menjaga keseimbangan, produksi, industri properti harus jalan, dan masyarakat juga harus bisa menikmati rumah subsidi,” tandasnya.

<https://bangka.tribunnews.com/2023/05/27/pemerintah-bakal-terbitkan-aturan-harga-rumah-subsidi-bulan-depan-bakal-naik?page=all>